

**ANALISIS ANGGARAN RESPONSIF GENDER
DI KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2017– 2018**

Diny Ayu Wulandhari, Puji Astuti

Departemen Politik dan Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Gender Responsive Budgeting was an integration of PUG that can accommodate justice for women and men to have equal opportunities in obtaining access, benefits, participation, and equality in development achievements. However, the reality on the ground, especially in Kendal Regency, is that the implementation of gender-responsive budgeting is still not optimal in accommodating gender needs. This is suspected because gender issues have not become a priority issue and SKPD still does not understand what is meant by ARG.

This study aims to find out how the implementation and constraints that affect the implementation of the gender-responsive budget in Kendal Regency 2017-2018 fiscal year. The method in study is descriptive qualitative research with data collection techniques through interviews and documentation. In which case, the author will research and interview several informants at SKPD who have implemented ARG in detail in the hope of obtaining comprehensive data related to ARG.

The results of this study show that the implementation of ARG in Kendal Regency is still not optimal and there are no points that require SKPD to budget for gender responsiveness. Of the 33 SKPDs, there are only 6 SKPDs that carry out ARG. The analysis of the budget allocation category, Special Budget for Gender Targets, there are 21 programs, the Gender Equality Institutional Budget has 5 programs and the Gender Equality Budget in General there are 22 programs. Constraints on the implementation of gender-responsive budgets are policy factors including legal strength and government commitment, structural factors including human resource capacity and the dominance of structures and cultural factors including the degree of women's participation and gender views.

The suggestion that can be conveyed to the Kendal Regency Regional Government is that the Kendal Regency Regional Government can formulate regional policies through regional regulations as a clear implementation guideline in regulating PUG and ARG, so that all SKPD or regional autonomy implementing bodies will overall compile programs and activities that respond to gender needs. So that the implementation of ARG in the Kendal Regency Regional Government can run optimally.

Keywords : Gender Responsive Budgeting, Categories, Constraints

PENDAHULUAN

Semua warga negara baik laki-laki maupun perempuan memiliki peluang guna membenahi dan mempertahankan kehidupan mereka tanpa adanya perbedaan. Akan tetapi masih rendahnya integrasi gender pada proses pembangunan menimbulkan kesenjangan gender diberagam bidang. Pada dasarnya terdapat dua langkah intervensi untuk mengurangi kesenjangan gender yaitu pengembangan kebijakan yang spesifik gender dan perencanaan penganggaran yang responsif gender dengan melaksanakan penyesuaian pada kebijakan yang sudah ada. Langkah yang dapat diambil mencakup dengan melaksanakan pengarusutamaan gender lewat perumusan kebijakan yang sudah ada harus berperspektif gender serta melaksanakan sosialisasi kesetaraan serta keadilan gender mencakup isu yang butuh difokuskan beserta keahlian teknik analisis gender pada para perencana dan pelaksana pembangunan sehingga menghasilkan program pembangunan yang responsif gender (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bekerja sama dengan *Women's Support Project II*, 2001:3)

Dalam rangka meningkatkan kesetaraan serta keadilan gender pemerintah Indonesia telah berkomitmen dengan melakukan kebijakan pengarusutamaan gender melalui Instruksi

Presiden Nomor 9 tahun 2000 guna menginstruksi diseluruh unit pemerintahan di bawah koordinasi Baperlitbang, guna mengintegrasikan PUG ke dalam perencanaan serta penganggaran. Komitmen pemerintah guna melakukan pengarusutamaan gender dapat dilihat lewat pengintegrasian isu gender dalam pembangunan. Dimana hal ini merupakan strategi untuk menciptakan kesetaraan serta keadilan gender yang mana tergapai saat berlangsung kesamaan posisi serta kedudukan guna laki-laki serta perempuan mendapat peluang, akses, partisipasi, kontrol serta kegunaan dari sumberdaya yang ada serta hak-haknya selaku manusia supaya bisa berperan beserta berkontribusi di aktivitas politik ekonomi, sosial budaya serta terdapatnya kesamaan guna menikmati capaian pemanfaatan capaian pembangunan yang sepadan perempuan serta laki-laki (Rostanty, 2007:70).

Salah satu daerah yang ikut serta dalam meningkatkan kesetaraan gender yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal. Pemerintah Kabupaten Kendal berusaha mewujudkan pengarusutamaan gender dan pembangunan daerah yang responsif gender melalui dirumuskannya RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kab Kendal Tahun Anggaran 2016-2021. Dalam dokumen perencanaan lima tahunan tersebut termuat

di misi pembangunan daerah yakni menciptakan pemerataan pembangunan dan berkeadilan dimana misi tersebut berusaha untuk memusnahkan diskriminasi diberagam aspek mencakup gender. Serta permasalahan utama gender yang terdapat di Kabupaten Kendal sendiri yaitu sebagai berikut: (RPJMD Kabupaten Kendal 2016-2021: 163)

1. Masih rendah kualitas serta peranan wanita dipembangunan;
2. Masih terdapatnya ketimpangan gender dirakyat;
3. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan guna kenaikan perekonomian keluarga;
4. Tengah minimnya lembaga PUG yang aktif diusaha penggapaian kesetaraan gender.

Berdasarkan data yang diolah penulis dari BPS Kabupaten Kendal berikut data pendukung permasalahan gender di Kabupaten Kendal :

- a. Data perempuan sebagai tenaga profesional di tahun 2017 sebesar 50,99% dan tahun 2018 sebesar 49,48 % dan sebagai parlemen di tahun 2017 sebesar 22,73 % dan tahun 2018 sebesar 24,44 %. Hal ini menunjukkan peranan aktif perempuan dalam bidang politik melalui dalam parlemen tiap tahunnya

mengalami penurunan dan masih dalam presentase yang rendah karena pencapaiannya kurang dari 50%. Terlihat juga peran perempuan jabatan sebagai tenaga profesional tiap tahunnya mengalami kenaikan dan masih dalam presentase yang sedang karena pencapaiannya berada di lebih dari 50% tetapi kurang dari 100%.

- b. Data IPM menurut jenis kelamin yaitu laki-laki di tahun 2017 sebesar 74,22% dan tahun 2018 sebesar 74,91 % dan perempuan di tahun 2017 sebesar 69,21 % dan tahun 2018 sebesar 69,64 %. Hal ini dapat dilihat dari tahun ke tahun jumlahnya lebih besar laki-laki daripada perempuan, sehingga dapat diartikan masih terdapatnya ketimpangan gender masyarakat khususnya bagi perempuan dalam memperoleh akses pembangunan.
- c. Data sumbangan pendapatan perempuan di tahun 2017 sebesar 34,86% dan tahun 2018 sebesar 34,91 %. Hal ini menunjukkan tiap tahunnya masih dalam presentase yang rendah karena pencapaiannya kurang dari 50%, walaupun tiap tahunnya mengalami kenaikan. Sehingga IDG di Kabupaten Kendal masih belum cukup tinggi dan belum optimalnya pemberdayaan perempuan guna kenaikan perekonomian keluarga.

d. Data rata-rata lama sekolah menurut jenis kelamin yaitu laki-laki di tahun 2017 sebesar 7,79% dan tahun 2018 sebesar 7,64 % dan perempuan di tahun 2017 sebesar 6,78 % dan tahun 2018 sebesar 6,47 %. Hal ini dapat dilihat dari tahun ke tahun jumlahnya lebih besar laki-laki daripada perempuan. Hal ini dapat diartikan masih rendah kualitas serta peranan perempuan dalam pendidikan secara formal, karena minimnya perempuan dalam menyentuh pendidikan juga berdampak pada tingkat kesetaraan dan keadilan untuk perempuan itu sendiri.

Dengan demikian maka, dilihat dari penyajian beberapa data pendukung permasalahan gender dan penjelasannya diatas menunjukkan realita yang ada di lapangan khususnya di Kabupaten Kendal masih terdapat kesenjangan gender terlebih kepada perempuan karena perempuan masih tertinggal di belakang laki-laki baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi hingga keterwakilan dalam politik. Kenyataannya di Kabupaten Kendal anggaran yang ada belum cukup mengakomodasikan kebutuhan gender khususnya pada perempuan sehingga masih terjadi adanya kesenjangan gender dalam pembangunan daerah. Padahal semua hal yang dijelaskan diatas

berpengaruh langsung pada tercapainya kesetaraan pembangunan bagi laki-laki dan perempuan.

Penelitian ini dimaksudkan guna mengkaji anggaran responsif gender di Kabupaten Kendal dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan anggaran responsif gender di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2017-2018 ?
2. Apasaja kendala atau hambatan yang mempengaruhi dalam proses penerapan anggaran responsif gender di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2017-2018

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara yang mana penulis akan meneliti dan mewawancarai beberapa informan di SKPD yang melaksanakan ARG secara rinci dengan harapan mendapatkan data yang komprehensif dan dokumentasi dengan penghimpunan data lewat proses menyelenggarakan ataupun meninjau ulang berkas yang sudah tersedia guna mendalami lagi informasi yang sudah tersimpan. Lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2017-2018. Subjek penelitian ini adalah Kepala

Subbag Perencanaan dan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kepala Subbag Perencanaan dan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Staff Subbag Perencanaan dan Keuangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal, Kasie Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kepala Subbag Perencanaan dan Keuangan Dinas Kesehatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pelaksana Anggaran Responsif Gender di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2017-2018

Berdasarkan Rekapitulasi Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Kabupaten Kendal 2017-2018 terdapat 6 (enam) SKPD yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yaitu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Sekretariat DPRD. Sedangkan SKPD yang menjadi tim kelompok kerja

pengarusutamaan gender di tingkat kabupaten menurut Surat Keputusan Bupati Kendal No. 411.4/480/2017 terdapat kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) anggota tim kelompok kerja. Jika dilihat perbandingan secara presentase antara tim kelompok kerja yang terbentuk dengan SKPD yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender jumlahnya hanya 18% saja. Dalam RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 tidak menjelaskan mengenai pelembagaan pengarusutamaan gender khususnya SKPD dalam menganggarkan ARG. Jadi tidak menekankan poin mengenai kewajiban untuk menganggarkan ARG, akan tetapi lebih ke arah hanya menghimbau SKPD untuk mengintegrasikan PUG ke dalam perencanaan serta penganggaran.

Analisis Kategori Anggaran Responsif Gender di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2017-2018

Berdasarkan pembagian kategori anggaran responsif gender oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, maka hasil analisis Anggaran Responsif Gender Kabupaten Kendal 2017-2018 yaitu:

- a. Alokasi Anggaran Khusus Target Gender atau Spesifik Gender yaitu alokasi anggaran yang diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan khusus

untuk kelompok gender tertentu seperti untuk laki-laki saja atau perempuan saja serta kelompok rentan seperti individu miskin, korban kekerasan berdasarkan hasil analisis gender. SKPD yang menjalankan hanya 5 (lima) SKPD yaitu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dari ke-lima dinas yang melaksanakan alokasi Anggaran Khusus Target Gender total terdapat 21 program kegiatan.

- b. Alokasi Anggaran Pelembagaan Kesetaraan Gender atau Tindakan Afirmasi yaitu alokasi anggaran yang diperuntukkan guna penguatan pelembagaan baik dalam peningkatan kapasitas sumberdaya manusia maupun secara pendataan. SKPD yang menjalankan hanya 2 (dua) SKPD yaitu Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sekretariat DPRD, Dari ke-dua dinas yang melaksanakan alokasi Anggaran Pelembagaan Kesetaraan Gender total terdapat 5 program kegiatan.
- c. Alokasi Anggaran Kesetaraan Gender Secara Umum yaitu alokasi anggaran

yang diperuntukkan guna mengatasi masalah kesenjangan gender dalam berbagai bidang pembangunan termasuk diantara kesenjangan pada akses, partisipasi, kontrol dan manfaat terhadap sumberdaya pembangunan secara umum. SKPD yang menjalankan 4 (empat) SKPD yaitu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dari ke-empat dinas yang melaksanakan alokasi Anggaran Kesetaraan Gender total terdapat 22 program kegiatan.

Analisis Perbandingan Alokasi Anggaran Responsif Gender di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2017-2018

Berdasarkan analisis penulis terkait perbandingan alokasi anggaran responsif gender di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2017 dan 2018 yaitu

- e. Total alokasi alokasi anggaran di tahun 2017 sebesar Rp. 23.423.645.950 dan di tahun 2018 sebesar Rp. 31.417.288.400. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2017 pada tahun anggaran 2018 lebih

- besar dan terjadi kenaikan alokasi anggaran sebesar Rp.7.993.642.450.
- f. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan 6 program kegiatan serta jumlah alokasi anggaran di tahun 2017 sebesar Rp. 162.418.000 dan di tahun 2018 sebesar Rp. 241.100.000. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2017 terjadi kenaikan alokasi anggaran di tahun anggaran 2018 sebesar Rp.78.682.000.
 - g. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan 17 program kegiatan serta jumlah alokasi anggaran di tahun 2017 sebesar Rp. 682.949.200 dan di tahun 2018 sebesar Rp. 780.000.000. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2017 terjadi kenaikan alokasi anggaran di tahun anggaran 2018 sebesar Rp.97.050.800.
 - h. Sekretariat DPRD dengan 1 program kegiatan serta jumlah alokasi anggaran di tahun 2017 sebesar Rp. 1.990.155.750 dan di tahun 2018 sebesar Rp. 1.695.263.000. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2017 terjadi penurunan alokasi anggaran di tahun anggaran 2018 sebesar Rp.294.892.750.
 - i. Dinas Pertanian dan Pangan dengan 3 program kegiatan serta jumlah alokasi anggaran di tahun 2017 sebesar Rp. 427.200.000 dan di tahun 2018 sebesar Rp. 155.000.000. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2017 terjadi penurunan alokasi anggaran di tahun anggaran 2018 sebesar Rp.272.200.000.
 - j. Dinas Kesehatan dengan 6 program kegiatan serta jumlah alokasi anggaran di tahun 2017 sebesar Rp. 17.710.523.000 dan di tahun 2018 sebesar Rp. 27.500.925.400. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2017 terjadi kenaikan alokasi anggaran di tahun anggaran 2018 sebesar Rp.9.790.402.400.
 - k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan 6 program kegiatan serta jumlah alokasi anggaran di tahun 2017 sebesar Rp. 1.485.600.000 dan di tahun 2018 sebesar Rp. 1.485.600.000. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2017 terjadi penurunan

Kendala Penerapan Anggaran Responsif Gender di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2017-2018

Jumlah anggaran responsif gender yang masih rendah menyebabkan minimnya juga pencapaian hasil kerja atau output yang diharapkan. Dalam penerapan anggaran responsif gender masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dari

berbagai tatanan dengan faktor-faktor sebagai berikut :

1. Faktor kebijakan yang meliputi kekuatan hukum yaitu masih minimnya jumlah anggaran responsif gender di Kabupaten Kendal karena regulasi yang ada dirasa masih kurang mendorong upaya mengimplementasikan anggaran responsif gender di Kabupaten Kendal. Serta tidak terdapat regulasi lain yang mengatur mengenai panduan teknis dalam perencanaan, penyusunan serta penganggaran anggaran responsif gender. Masih lemah serta kurang mengikatnya aturan atau regulasi mengenai anggaran responsif gender sangat berpengaruh terhadap proses pelaksanaannya, sehingga hal ini mempengaruhi juga besaran anggaran yang diperuntukan alokasi anggaran gender. Serta Komitmen Pemerintah yaitu masih tergolong rendah, dapat dilihat dari pelebagaan tim kelompok kerja pengarusutamaan gender di Kabupaten Kendal masih belum berfungsi optimal dalam mengefektifkan fungsi dan perannya, dapat dilihat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan anggaran responsif gender hanya 6 (enam) dinas saja. Ditambah dengan

tidak adanya tim kelompok kerja di setiap satuan kerja perangkat daerah sehingga bekerja sesuai tugas pokok fungsi tiap pegawai dengan standar operasional kerja saja. Minimnya gender sebagai isu prioritas membuat satuan kerja perangkat daerah beranggapan bahwa anggaran responsif gender bukan menjadi tugas utamanya dan lebih menakanankan ke dinas perempuan karena yang berkaitan langsung dan berfokus pada perempuan. Serta data analisis pilah gender yang kurang mumpuni dalam penyusunan anggaran, sehingga setiap satuan kerja perangkat daerah kurang peka terhadap isu gender karena alat analisis gendernya terbatas;

2. Faktor struktural yang meliputi dominasi struktur yaitu pada proses penganggaran seakan menjadi dominasi lembaga legislatif dan lembaga eksekutif, karena sudah terdapat grand desain yang memploting anggaran untuk kegiatan satu tahun kedepan. Masyarakat hanya terlibat pada proses perencanaan melalui forum musyawarah rencana pembangunan di berbagai tingkat. Walaupun begitu partisipasi masyarakat di Kabupaten Kendal masih dirasa sebatas formalitas saja dalam memenuhi kuota partisipasi forum. Pemerintah daerah selalu

mensosialisasikan mengenai musyawarah rencana pembangunan daerah, sosialisasi ini masih minim perwakilan dan minim usulan dari masyarakat yang lebih inovatif. Serta kapasitas sumber daya manusia yaitu masih rendahnya ketrampilan sumber daya manusia dalam melakukan analisis gender. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia khususnya pegawai sebagai pengelola program serta aktivitas belum memahami sengan mendadalm terkait program serta aktivitas yang mengacu pada perencanaan dan penganggaran responsif gender. Bapperlitbang dan DP2KBP3A sudah memberikan sosialisasi dan pelatihan analisis gender, namun terbatas pada durasi dan penyelenggarannya sehingga jangkauan pesertanya pun juga terbatas. Setiap satuan kerja perangkat daerah hanya menganalisis dengan analisis gender berdasarkan data pilah gender sederhana tidak menggunakan alat analisis atau tools *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS) yang lebih spesifik dan terperinci mengidentifikasi isu gender, kesenjangan gender dan permasalahan gender sekaligus dalam penyusunan rencana kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan

untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender; dan

3. Faktor kultural yang meliputi derajat partisipasi perempuan yaitu partisipasi perempuan dalam keterwakilan di Dewan Perwakilan Daerah masih rendah, hal ini dapat dilihat dari data anggota DPRD tahun 2018 dengan total jumlah anggota 45 anggota yang terbagi menjadi 34 anggota laki-laki dan 11 anggota perempuan. Jika perbandingannya dipresentasikan perwakilan anggota dewan laki-laki sebesar 75% dan perwakilan anggota dewan perempuan sebesar 25%. Hal ini menunjukkan masih minimnya keterwakilan perempuan menjadi anggota dewan karena keterwakilannya masih dibawah 30% sebagai batas minimal perwakilan perempuan dalam dunia politik. Minimnya keterwakilan perempuan di parlemen turut berpengaruh terhadap isu kebijakan kesetaraan gender dan kemampuan dalam merespon masalah utama yang dihadapi perempuan. Pelibatan masyarakat dalam forum muserenbang bersifat formalitas saja untuk memenuhi kuota kehadiran perwakilan terutama pada perempuan. Dengan tidak proporsional perbandingan antara laki-laki dan perempuan dalam musrenbang atau forum penyampaian aspirasi membuat

perempuan merasa kurang penting dalam pelibatan pengambilan keputusan. Serta pandangan gender yaitu masih rancunya pemahaman dan persepsi mengenai gender itu sendiri, gender masih dipahami sebagai perempuan dan pengarusutamaan gender dipahami sebagai program kegiatan yang diarahkan pada pemberdayaan perempuan. Hal inilah yang menjadikan isu gender di Kabupaten Kendal masih belum menjadi isu prioritas dan integrasi dalam program perencanaan serta penganggarannya belum maksimal. Dengan masih minimnya pemahaman konsep gender yang . Dapat dilihat dari satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan perencanaan dan penganggaran responsif gender hanya terdapat 6 (enam) satuan kerja perangkat daerah saja dan itu pun keenam SKPD dalam melakukan analisis gender hanya dengan data pilah sederhana aja.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan di wawancara yang sudah penulis laksanakan dengan sejumlah informan di beberapa SKPD ataupun Dinas terkait di Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dengan hasil obeservasi dan hasil penelitian beberapa dokumen pemerintah daerah tentang anggaran

responsif gender di Kabupaten Kendal maka bisa ditetapkan sejumlah konklusi:

1. Anggaran Responsif Gender di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2017-2018 masih belum terlaksana secara optimal, karena berdasarkan data yang ditemukan oleh penulis dalam dokumen dan wawancara dengan beberapa narasumber belum semua SKPD di Kabupaten Kendal. Perihal itu bisa ditinjau dari data rekapitulasi pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender Kabupaten Kendal tahun anggaran 2017 -2018 dengan jumlah keseluruhan satuan kerja perangkat daerah yang mencapai 33 (tiga puluh tiga) sedangkan yang melaksanakan anggaran responsif gender hanya baru mencapai 6 (enam) saja yaitu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sekretariat DPRD, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa,. Jika dilihat perbandingan antara SKPD yang melaksanakan ARG dengan yang belum melaksanakan dapat dikatakan cukup besar, secara presentase antara tim kelompok kerja yang terbentuk dengan SKPD yang melaksanakan Perencanaan

dan Penganggaran Responsif Gender jumlahnya hanya 18% saja pelaksananya.

2. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 tidak dijelaskan mengenai pelebagaan pengarusutamaan gender khususnya SKPD, sehingga hanya merupakan himbauan kepada SKPD dan tidak mewajibkan secara legal formal untuk menganggarkan Anggaran Responsif Gender. Maka dari itu penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan anggaran responsif gender di Kabupaten Kendal masih belum maksimal dan belum terlaksana dengan baik karena isu gender belum menjadi prioritas dan tidak mewajibkan SKPD dalam menganggarkan responsif gender, serta masih terdapat ketimpangan SKPD yang sudah melaksanakan anggaran responsif gender sehingga berdampak pada komitmen pemerintah daerah yang masih rendah.

3. Berdasarkan analisis program serta aktivitas dari 6 (enam) SKPD yang menjalankan anggaran responsif gender dengan kategori alokasi anggaran yaitu alokasi anggaran Khusus Target Gender atau Spesifik Gender hanya terdapat 21 program kegiatan, alokasi anggaran Pelebagaan Kesetaraan Gender atau Tindakan Afirmasi hanya terdapat 5 program kegiatan dan alokasi anggaran Kesetaraan Gender Secara Umum terdapat 22 program kegiatan. Dari ketiga kategori alokasi anggaran responsif gender, yang

paling banyak dianggarkan yaitu pada kategori Anggaran Kesetaraan Gender Secara Umum. Hal ini dapat dilihat dengan total 22 program aktivitas serta SKPD yang program kegiatannya masuk dalam ketiga kategori anggaran responsif gender secara merata yaitu hanya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Serta perbandingan total alokasi anggaran untuk program serta aktivitas anggaran responsif gender di Kabupaten Kendal dari 6 (enam) satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan anggaran responsif gender yaitu pada Tahun Anggaran 2017 teralokasikan dana sebesar Rp. 23.423.645.950 dan Tahun Anggaran 2018 teralokasikan dana sebesar Rp. 31.417.288.400. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2017 alokasi anggaran di tahun anggaran 2018 lebih besar dan terjadi kenaikan alokasi anggaran sebesar Rp 7.993.642.450.

4. Pada implementasi anggaran responsif gender masih ada sejumlah hambatan yang dihadapi dari berbagai tatanan, menurut penulis kendala yang dihadapi yaitu meliputi faktor kebijakan yang meliputi kekuatan hukum atau dasar hukum pelaksanaan anggaran responsif gender yang hanya tercantum di Surat Keputusan Bupati No. 411.4/480/2017 mengenai Pembentukan Pokja PUG di Kabupaten Kendal dan komitmen

pemerintah masih rendah dapat dilihat dari gender yang belum menjadi isu prioritas di satuan kerja perangkat daerah dan hanya 6 (enam) dinas saja yang menganggarkan ARG serta tidak adanya tim pokja di SKPD. Faktor struktural kapasitas sumber daya manusia masih rendahnya pemahaman dan ketrampilan pegawai dalam melakukan analisis gender dan dominasi struktur pada pemangku kebijakan karena adanya plotting anggaran dan program yang telah ditetapkan sehingga masyarakat terkesan sebagai pelengkap formalitas saja. Serta yang terakhir faktor kultural derajat partisipasi perempuan karena tidak proporsionalnya perbandingan laki-laki serta perempuan dalam forum penyampaian aspirasi dan masih bersifat formalitas untuk memenuhi kuota kehadiran perwakilan terutama pada perempuan dan pandangan gender masih rancunya pemahaman dan persepsi mengenai gender itu sendiri, gender masih dimengerti selaku perempuan dan pengarusutamaan gender dipahami sebagai program kegiatan yang diarahkan pada dinas pemberdayaan perempuan saja.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang didapat, maka penulis memberi saran yang diharapkan bisa menjadi saran serta partisipasi pada kemajuan perkembangan pelaksanaan PUG yang tersalurkan melalui anggaran

responsif gender di Pemerintah Kabupaten Kendal yaitu sebagai berikut :

1. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan agar melaksanakan penelitian hingga ke seluruh satuan kerja pemerintah daerah atau dinas atau badan terkait. Harapannya adalah supaya penelitian yang dilakukan akan lebih komprehensif dapat mencerminkan pelaksanaan anggaran responsif gender di suatu daerah dengan meneliti semua jajaran seluruh satuan kerja pemerintah daerah.

2. Untuk Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku pembina utama gender agar memberikan fasilitas seperti penyediaan modul analisis, sosialisasi dan pelatihan yang lebih intensif tentang analisis anggaran responsif gender agar semua satuan kerja perangkat daerah memiliki pedoman atau panduan menganalisis dan memahami dengan jelas konsep menganalisis anggaran responsif gender serta melakukan pemantauan serta monitoring dari awal proses perencanaan hingga proses akhir evaluasi.

3. Untuk SKPD agar meningkatkan pemahaman mengenai anggaran responsif gender dan inovasi dalam program kegiatan yang dibuat agar lebih tepat sasaran dalam memenuhi kebutuhan gender serta memberi ruang dan akses

secara proporsional antara laki-laki dan perempuan.

4. Untuk seluruh pelaksana otonomi daerah agar memaksimalkan perannya dalam menyuarkan kebutuhan gender dan mengintegrasikan isu-isu gender untuk meningkatkan pembangunan gender di Kabupaten Kendal.

5. Untuk masyarakat khususnya pada perempuan yang memiliki peran besar dalam menyampaikan aspirasi dan supaya lebih aktif lagi dalam pelaksanaan anggaran responsif gender di Kabupaten Kendal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dr. J.R. Raco. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif : Jenis Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Sugiyono, (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Andi Prastowo. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif dalam perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.

Ahmadi, Rulam. (2016). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.

Moelong J. Lexy. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Suwandi dan Basrowi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rineka Cipta.

Budlender, Debbie et.all. (2002). *Gender Budget Make Cents (Understanding Gender Responsive Budget)*

Itsna Hadi Saptiawan dan Sugihastuti. (2007). *Gender dan Inferioritas Perempuan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Fakih, Mansour. (2008). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: INSISTPress.

Mustari, Dr. Nuryanti. 2015. *Pemahaman Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: LeutikaPrio.

Nurkholis, Moh. Khusaini, (2019). *Penganggaran Sektor Publik*. Malang : Universitas Brawijaya Press.

Fadillah Amin. (2019). *Penganggaran di Pemerintah Daerah*. Malang : Universitas Brawijaya Press.

Siti Hartini Sastryani. (2008). *Women in Publik Sector (Perempuan di Sektor Publik)*. Yogyakarta : Tiara Wacana.

Sri Mastuti dan Rinusu dkk. (2008). *Audit Gender Terhadap Kebijakan Anggaran di Indonesia*. Jakarta : CiBa.

Ismi Dwi Astuti Nurhaeni. (2013). *Pedoman Teknis Penyusunan GAP dan GBS*. Jakarta : Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD).

Rostanty Maya. (2007). *Modul Pelatihan Mewujudkan Anggaran Responsif Gender*. Jakarta : Pusat Telaah dan Informasi Regional PATTIRO

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. (2010). *Pedoman Teknis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Bagi Daerah*. Jakarta.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. (2010). *Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Generik*. Jakarta.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bekerja sama dengan

Women's Support Project II - CIDA. (2001). *Analisis Gender Dalam Pembangunan Hukum*. Jakarta.

Tesis

Tesis Kastari Mira. (2011). *Analisis Alokasi Anggaranresponsif Gender Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Pada Apbd Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2008-2010*. UI: Jurusan Ilmu Administrasi FISIP.

Jurnal

Wewen Kusumi Rahayu . (2016). *Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah)* dalam Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik Volume 2, Nomor 1.